

ABSTRAK

PAJAR SETIAWAN. NIM. E. 1811266. Analisis Hukum Kebijakan Penanganan Penertiban Permukiman Liar Di Wilayah Kota Bogor. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. 2022.

Permasalahan bangunan liar merupakan masalah yang memang sudah pasti ada di seluruh Kota di Indonesia. Bangunan liar merupakan bangunan yang dibangun di tempat yang bukan menjadi peruntukannya dan didirikan tanpa izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan hukum dalam menangani penertiban permukiman liar di Kota Bogor dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penertiban permukiman liar di Kota Bogor. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Kesimpulan penelitian diketahui bahwa Kebijakan penanganan penertiban permukiman liar di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam menciptakan kondisi yang tentram, tertib dan teratur. Penertiban bangunan liar belum berjalan secara maksimal meskipun standar, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut sudah jelas, jumlah pelaksana kebijakan sudah memadai, koordinasi serta komunikasi antar instansi sudah berjalan baik serta pelaksanaan tugas dari pelaksana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Diketahui bahwa dalam penertiban ini pelaksana berjalan berdasarkan surat perintah yang diberikan dan juga fasilitas operasional pendukung kurang memadai. Selain itu juga respon serta partisipasi masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah masih rendah bahkan masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan daerah yang berlaku. Hambatan yang dihadapi dalam penertiban permukiman liar di Kota Bogor diantaranya yaitu a). Faktor internal berupa kekurangan personil dan kekurangan armada dan b). Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda izin mendirikan bangunan. Upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Bogor diantaranya yaitu a). Penyegehan dan penghentian dan b). Pembongkaran.

Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Penertiban, Permukiman Liar.

ABSTRACT

PAJAR SETIAWAN. NIM. E. 1811266. *Legal Analysis of Policies for Controlling Illegal Settlements in the City of Bogor.* Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022.

The problem of illegal buildings is a problem that certainly exists in all cities in Indonesia. Illegal buildings are buildings built in places that are not designated and erected without permission from the authorized government officials. The purpose of this study is to find out and analyze legal policies in dealing with controlling illegal settlements in the city of Bogor and to find out and analyze the obstacles faced in controlling illegal settlements in the city of Bogor. The research method is needed to collect a number of materials used to answer the juridical analysis. The research method is needed to collect a number of materials used to answer the juridical analysis. Starting from the problem, the method used is an empirical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. The conclusion of the study is that the policy for handling control of illegal settlements in the city of Bogor carried out by the Civil Service Police Unit plays a very important role in creating peaceful, orderly and orderly conditions. Controlling illegal buildings has not run optimally even though the standards, objectives, and targets of the policy are clear, the number of policy implementers is adequate, coordination and communication between agencies has gone well and the implementation of the duties of the implementers is in accordance with applicable regulations. It is known that in this enforcement the executor runs based on the order given and also the supporting operational facilities are inadequate. In addition, the response and participation of the community in the enforcement of regional regulations is still low and there are even people who do not care about the applicable regional regulations. The obstacles faced in controlling illegal settlements in the city of Bogor include a). Internal factors in the form of personnel shortages and fleet shortages and b). The external factor is the lack of public understanding of the Perda on building permits. Legal efforts made by the Civil Service Police Unit in overcoming violations of building permits in Bogor City include a). Sealing and termination and b). Demolition.

Keywords: Policy, Handling, Control, Illegal Settlements.